



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 83 TAHUN 2021 TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DAN  
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah dan masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
  - b. bahwa dengan adanya beberapa indikator kinerja utama yang tidak sesuai dengan RPJMD dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berubah dan sudah kurang sesuai sehingga perlu penyesuaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan untuk menyesuaikan RPJMD, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 83 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 perlu disesuaikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator

8-

Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);
  6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 83 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 83 TAHUN 2021 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I dan II pada Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Kinerja Utama Perangkat

9-

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 83) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 22 Mei 2025

BUPATI PEMALANG,

ttd  
cap

ANOM WIDIYANTORO

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 22 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,

ttd  
cap

HERIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Pemalang,



ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.  
PEMBINA  
NIP. 197810292006041008

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI PEMALANG  
 NOMOR 10 TAHUN 2025  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 83 TAHUN 2021 TENTANG INDIKATOR  
 KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN  
 PEMALANG DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN  
 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021-2026

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat	Angka kriminalitas	Angka	$\frac{\text{Jumlah kasus kejahatan}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100.000$
		Indeks Risiko Bencana	Indeks	$\frac{\text{hazard (bahaya)} \times \text{vulnerability (kerentanan)}}{\text{capacity (kapasitas)}}$
2.	Mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Hasil evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi dari Kementerian PAN dan RB
3.	Meningkatnya birokrasi akuntabel	Capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	Evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB berdasarkan upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja, pedoman akuntabilitas kinerja yang telah disusun, pemutakhiran data kinerja yang dilakukan secara berkala
		Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks	(Kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah) – (pendapatan yang penggunaannya telah ditentukan dan belanja tertentu)
		Manajemen Resiko Indeks		Evaluasi dari BPKP meliputi: (1) Kapabilitas terdiri dari kepemimpinan, strategi dan kebijakan manajemen risiko, sumber daya manusia dan kemitraan; (2) Hasil terdiri dari aktivitas penanganan risiko dan outcomes.

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
4.	Meningkatnya Birokrasi Kapabel	Indeks SPBE	Indeks	Indeks komposit SPBE berdasarkan: kepemilikan arsitektur SPBE, kepemilikan peta rencana SPBE, pelaksanaan tugas tim koordinasi SPBE, penerapan manajemen layanan SPBE, layanan kepegawaian berbasis elektronik, layanan kearsipan berbasis elektronik, layanan perencanaan, penganggaran, dan kinerja berbasis elektronik, layanan publik berbasis elektronik
5.	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat	Indeks	Rerata capaian kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik pada Perangkat Daerah
6.	Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$
7.	Meningkatnya kualitas pendidikan yang berdaya saing	Rata-rata lama sekolah	Tahun	$RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{lama sekolah}$
		Harapan lama sekolah	Tahun	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$
8.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur
9.	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	$IPJ = 1/3 (Xade(1) + Xade(2) + I inc-dis)$ <p>Ket :</p> <p>X ade(1) = X ade untuk harapan hidup  X ade(2) = X ade untuk pendidikan  I inc-dis = Indeks distribusi pendapatan</p>
10.	Meningkatkan nilai-nilai budaya, toleransi dan karakter bangsa	Indeks Kebudayaan	Indeks	$\sum_{j=1}^7 (W_j * Indeks Dj)$ <p>Keterangan:  Dj : Dimensi ke-j  Wj : Bobot dimensi ke-j  Indeks Dj : Indeks Dimensi ke-j</p>



NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
		Indeks kerukunan umat beragama	Indeks	Perhitungan dari tiga dimensi utama: toleransi, kesetaraan dan kerjasama antar umat beragama
11.	Meningkatnya kualitas budaya literasi di masyarakat	Nilai budaya literasi	Indeks	$\frac{\text{Persentase penduduk yang membaca media cetak/elektronik} + \text{Persentase penduduk yang mengakses internet} + \text{Persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan}}{3}$
12.	Meningkatkan penanganan kemiskinan, pengangguran dan kesejahteraan sosial	Angka kemiskinan	%	$\frac{\text{Jumlah penduduk miskin}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$
13.	Meningkatnya daya saing tenaga kerja dalam rangka penurunan pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	$\frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100$
		PDRB per kapita	Ribu Rupiah	Gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah
14.	Meningkatkan sinergitas pembangunan desa dan kota dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah	Indeks Desa Membangun	Indeks	$\frac{1}{3} (IS + IEK + IL)$ <p>Keterangan:  IS : Indeks Sosial  IEK : Indeks Ekonomi  IL : Indeks Lingkungan (ekologi)</p>
		Indeks ketimpangan antar wilayah	Indeks	$\frac{\sqrt{\frac{\sum (Y_i - \bar{y})^2 f_i / n}{\bar{y}}}}{\bar{y}}$ <p>Keterangan:  fi : Jumlah penduduk Kecamatan ke-i  n : Jumlah penduduk Kabupaten/Kota  Yi: Skor infrastruktur Kecamatan ke-i  ý : Skor infrastruktur Kabupaten/Kota</p>
15.	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri	%	$\frac{\text{Jumlah Desa kategori mandiri}}{\text{Jumlah seluruh desa}} \times 100$
16.		Pertumbuhan ekonomi	%	$\frac{\text{PDRB ADHK } n - \text{PDRB ADHK } (n - 1)}{\text{PDRB ADHK } (n - 1)} \times 100$

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN												
1	2	3	4	5												
	Meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi unggulan dalam upaya kemandirian ekonomi daerah	Laju Inflasi	%	$[(1 + \Delta Inf_1)(1 + \Delta Inf_2)(1 + \Delta Inf_t)]^{1/t} - 1$ <p>Dimana :</p> <p><math>\Delta Inf</math> = perubahan inflasi dari nilai tahun sebelumnya</p> <p>t = adalah periode pengamatan perubahan nilai inflasi.</p> <p>Sedangkan <math>\Delta Inf</math> dihitung dengan rumus sebagai berikut :</p> $\Delta Inf = \frac{Inf_{(n+1)} - Inf_{(n)}}{Inf_{(n)}} \times 100\%$ <p>Dimana :</p> <p><math>Inf_n</math> = nilai inflasi pada tahun n</p> <p><math>Inf_{(n+1)}</math> = nilai pada 1 tahun berikutnya</p> <p>n = tahun ...</p>												
17.	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur, meliputi: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Jalan</td> <td style="width: 50%;">7. LPJU</td> </tr> <tr> <td>2. Irigasi</td> <td>8. Rumah susun</td> </tr> <tr> <td>3. Air minum</td> <td>9. APILL</td> </tr> <tr> <td>4. Drainase</td> <td>10. Perpakiran</td> </tr> <tr> <td>5. persampahan</td> <td>11. Terminal</td> </tr> <tr> <td>6. RTH</td> <td>12. Hotspot</td> </tr> </table>	1. Jalan	7. LPJU	2. Irigasi	8. Rumah susun	3. Air minum	9. APILL	4. Drainase	10. Perpakiran	5. persampahan	11. Terminal	6. RTH	12. Hotspot
1. Jalan	7. LPJU															
2. Irigasi	8. Rumah susun															
3. Air minum	9. APILL															
4. Drainase	10. Perpakiran															
5. persampahan	11. Terminal															
6. RTH	12. Hotspot															
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Indeks	$(0,376 \times \text{Indeks Kualitas Air}) + (0,405 \times \text{Indeks Kualitas Udara}) + (0,219 \times \text{Indeks Kualitas Lahan})$												
18.	Meningkatnya cakupan universal akses	Persentase capaian universal akses	%	Rerata capaian layanan air minum, sanitasi lingkungan dan penanganan kawasan kumuh												

BUPATI PEMALANG,

ttd

cap

ANOM WIDIYANTORO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI PEMALANG  
 NOMOR 10 TAHUN 2025  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 83 TAHUN 2021 TENTANG INDIKATOR  
 KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN  
 PEMALANG DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
 TAHUN 2021 – 2026

A. SEKRETARIAT DAERAH

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang pemerintahan dan kesra	% pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan dibidang pemerintahan dan kesra	%	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang pemerintahan dan kesra
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang perekonomian dan pembangunan	% pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang perekonomian dan pembangunan	%	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang perekonomian dan pembangunan
3.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang administrasi umum	% pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan dibidang administrasi umum	%	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang administrasi umum
4.	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP dari Inspektorat

## B. SEKRETARIAT DPRD

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD	Cakupan layanan Sekretariat DPRD	%	$\frac{\text{Persentase dukungan pelaksanaan tupoksi DPRD yang tersedia} + \text{Persentase dukungan pelaksanaan tugas fungsi lain DPRD} + \text{Persentase layanan kepada DPRD yang tersedia}}{3}$
2.	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP dari Inspektorat

## C. INSPEKTORAT

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Terselenggaranya pengawasan internal yang menjamin mutu atas kinerja Pemda dalam mewujudkan Birokrasi yang transparan dan akuntabel	Maturitas SPIP	Skor	Penilaian Evaluasi dari BPKP
2.	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan	Kapabilitas APIP	Level	Penilaian Evaluasi dari BPKP
3.	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP dari Inspektorat

## D. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya partisipasi sekolah masyarakat	Angka Partisipasi Sekolah PAUD (warga negara usia 4-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD)	%	$\frac{\text{Jumlah siswa pada jenjang PAUD}}{\text{Jumlah penduduk usia 4 - 6 tahun}} \times 100$
		Angka Partisipasi Sekolah dasar (warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam SD/MI)	%	$\frac{\text{Jumlah siswa pada SD, MI, Paket A}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun}} \times 100$
		Angka Partisipasi Sekolah Menengah Pertama (warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam SMP/MTs)	%	$\frac{\text{Jumlah siswa pada jenjang SMP, MTs, Paket B}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun}} \times 100$
		Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan (warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan)	%	$\frac{\text{Jumlah siswa pada jenjang Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, C}}{(\text{Jumlah penduduk usia 7 - 18 tahun}) - (\text{Jumlah siswa jenjang SD, SMP, SMP})} \times 100$
2.	Meningkatnya kualitas Lembaga Pendidikan	Jumlah Sekolah Terakreditasi minimal B	%	$\frac{\text{Jumlah SD/SMP terakreditasi B}}{\text{Jumlah SD/SMP}}$
3.	Meningkatnya Warisan Budaya yang dilestarikan	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	%	$\frac{\text{Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan}}{\text{Jumlah warisan budaya yang di data}} \times 100$  $\frac{\text{Jumlah warisan budaya tak benda yang ditetapkan}}{\text{Jumlah warisan budaya tak benda yang di data}} \times 100$  $\frac{\text{Jumlah (rumus A + rumus B)}}{2} \times 100$
		Cakupan warisan budaya yang dilestarikan	%	$\frac{\text{Warisan budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah warisan budaya yang diregistrasi}} \times 100$
4.	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP dari Inspektorat

## E. DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya jumlah pemuda yang menjadi wirausaha pemuda	Persentase wirausaha pemuda	%	$\frac{\text{Jumlah wirausaha pemuda}}{\text{Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan}} \times 100$
2.	Meningkatnya jumlah pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	$\frac{\text{Jumlah pemuda (16 – 30 tahun) anggota aktif organisasi kepemudaan dan organisasi masyarakat}}{\text{Total jumlah pemuda (16 – 30 tahun)}} \times 100$
3.	Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga regional	Medali	Jumlah perolehan medali pada acara olahraga regional, nasional dan internasional
4.	Meningkatnya kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD	Persentase kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD	%	$\frac{\text{Jumlah retribusi pariwisata}}{\text{Jumlah PAD Kabupaten}} \times 100$
5.	Meningkatnya jumlah wisatawan	Persentase Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara perkebangaan	%	$\frac{\text{Jumlah wisman tahun } n - \text{Jumlah wisman tahun } (n - 1)}{\text{Jumlah wisman tahun } (n - 1)} \times 100$
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	$\frac{\text{Jumlah wisnus tahun } n - \text{Jumlah wisnus tahun } (n - 1)}{\text{Jumlah wisnus tahun } (n - 1)} \times 100$
6.	Meningkatnya tingkat hunian akomodasi	Persentase tingkat hunian akomodasi	%	$\frac{\text{Jumlah kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}} \times 100$
7.	Meningkatnya perkembangan sub sektor ekonomi kreatif potensial	Persentase perkembangan sub sektor ekonomi kreatif potensial	%	$\frac{\text{Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan}}{\text{Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang potensial}} \times 100$
8.	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP dari Inspektorat

## F. DINAS KESEHATAN

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per-100.000 KH	$\frac{\text{Jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan, dan paska persalinan}}{\text{Jumlah kelahiran hidup}} \times 100.000$
		Angka Kematian Bayi (AKB)	Per-1.000 KH	$\frac{\text{Jumlah kematian bayi usia 0 – 11 bulan}}{\text{Jumlah kelahiran hidup}} \times 1.000$
		Persentase Balita Stunting	%	$\frac{\text{Jumlah balita kategori stunting (pendek sangat pendek)}}{\text{Jumlah balita}} \times 100$
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Indeks	Angka hasil perhitungan dari 12 indikator Keluarga Sehat dari setiap keluarga dalam satu wilayah pada kurun waktu tertentu dengan skala 0-1
2.	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP dari Inspektorat

## G. DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Menurunkan angka kelahiran	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	$TFR = 5 \sum_{i=15-19}^{45-49} ASFR_i$ <p>ASFR<sub>i</sub> : ASFR untuk wanita pada kelompok usia ke-i i = kelompok usia 15-19, 20-24, ..., 45-49</p>
2.	Menurunkan angka kelahiran pada kelompok usia tertentu	ASFR (15-49 tahun)	Angka	$ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times k$
		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern contraceptive prevalence (mCP)		$\frac{\text{Jumlah peserta KB Aktif Modern}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100$

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	$\frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber - KB tetapi tidak terlayani}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100$
3.	Meningkatkan pemberdayaan gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	Ukuran yang menunjukkan tingkat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam 3 (tiga) dimensi yaitu : Kesehatan reproduksi, pemberdayaan gender, pasar tenaga kerja
4.	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Indeks PUG/Penghargaan APE	Indeks	Indeks perhitungan komponen komposit anugerah eka praya yang dinilai dari 7 (tujuh) komponen, terdiri dari: 1. Komitmen 2. Kebijakan 3. Kelembagaan 4. Sumber daya manusia dan anggaran 5. Alat analisis gender 6. Data gender 7. Partisipasi masyarakat
5.	Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak	Indeks PA/Penghargaan KLA	Nilai	Indeks Perhitungan pemenuhan Kabupaten Layak Anak
6.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan penanganan PMKS	% PMKS yang ditangani	%	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang ditangani}}{\text{Jumlah PMKS yang ada di Kabupaten Pemalang}} \times 100$
7.	Meningkatnya pemberdayaan, pemberian jaminan perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial pada penduduk yang terdaftar di DTKS	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	$\frac{\text{Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\text{Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis}} \times 100$
		Persentase korban bencana alam dan sosial perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	%	$\frac{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran}}{\text{Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten Pemalang}} \times 100$

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
8.	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP dari Inspektorat

## H. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Cakupan layanan administrasi kependudukan	%	$\frac{\text{Persentase kepemilikan dokumen kependudukan} + \text{Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil} + \text{Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama} + \text{Persentase peningkatan kualitas data kependudukan} + \text{Persentase peningkatan kualitas informasi kependudukan}}{5}$
2.	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP dari Inspektorat

## I. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya keberdayaan desa	Jumlah desa berdaya	Desa	Desa yang memenuhi kriteria: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki batas desa</li> <li>2. Sarana dan prasarana kewenangan desa dalam kondisi baik</li> <li>3. PADes-nya meningkat dari hasil kerjasama desa</li> <li>4. Buku administrasi pemerintahan desanya lengkap</li> <li>5. Penyusunan dokumen pemerintahan desa-nya tepat waktu</li> </ol>

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
				6. Digitalisasi administrasi pemerintahan desa dan layanan masyarakat 7. Memiliki Lembaga Keuangan Desa dan Lembaga Ekonomi Masyarakat yang berdaya
2.	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP dari Inspektorat

#### J. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Persentase peningkatan PMA dan PMDN	%	$\frac{\text{Realisasi investasi tahun } n - \text{Realisasi investasi tahun } (n - 1)}{\text{Realisasi investasi tahun } (n - 1)} \times 100$
2.	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP dari Inspektorat

#### K. DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi	Persentase koperasi berkualitas	%	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT volume usaha dan aset}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100$
2.	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	Persentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil	%	$\frac{\text{UMKM yang naik kelas menjadi kategori usaha kecil}}{\text{Jumlah seluruh UMKM}} \times 100$
3.	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah	pertumbuhan industri kecil dan menengah	%	$\frac{\text{Capaian sektor industri pengolahan tahun } n - \text{Capaian sektor industri pengolahan tahun } (n - 1)}{\text{Capaian sektor industri pengolahan tahun } n - 1} \times 100$

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
		Persentase pertumbuhan sektor Industri pengolahan dalam PDRB	%	$\frac{\text{Capaian sektor industri pengolahan tahun } n - \text{Capaian sektor industri pengolahan tahun } (n - 1)}{\text{Capaian sektor industri pengolahan tahun } n - 1} \times 100$
4.	Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan dalam perekonomian daerah	Persentase pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi, mobil dan sepeda motor dalam PDRB	%	$\frac{\text{Capaian sektor perdagangan besar eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tahun } n - \text{Capaian sektor perdagangan besar eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tahun } (n - 1)}{\text{Capaian sektor perdagangan besar eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tahun } (n - 1)} \times 100$
5.	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan	Pertumbuhan volume perdagangan besar dan eceran dalam daerah		$\frac{\text{jumlah volume perdagangan tahun } n - \text{Jumlah volume perdagangan } n - 1}{\text{Jumlah volume perdagangan } n - 1} \times 100\%$
		Prosentase pertumbuhan nilai ekspor		$\frac{\text{Nilai ekspor tahun berjalan} - \text{Nilai ekspor tahun sebelumnya}}{\text{Nilai ekspor tahun sebelumnya}} \times 100\%$
6.	Meningkatnya jumlah industri dan perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SI UP Toko Swalayan)		$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota}} \times 100$
7.	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP dari Inspektorat

## L. DINAS TENAGA KERJA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Mengurangi jumlah pengangguran	persentase pengangguran yang ditangani	%	$\frac{\text{Jumlah pengangguran yang ditangani}}{\text{Jumlah pengangguran seluruhnya}} \times 100$

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
2.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas tenaga kerja guna mengurangi angka pengangguran serta perlindungan tenaga kerja	Indeks Ketenagakerjaan	%	$\frac{\text{Persentase pelatihan berbasis kompetensi} + \text{Persentase tenaga kerja yang ditempatkan} + \text{Persentase hubungan industrial}}{3}$
3.	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP dari Inspektorat

## M. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan TIK	Persentase Network Terintegrasi	%	$\frac{\text{Jumlah jaringan (network) perangkat daerah dan layanan publik yang terintegrasi}}{\text{Jumlah seluruh perangkat daerah dan layanan publik}} \times 100$
2.	Peningkatan kualitas pelayanan informasi publik	Indeks/nilai Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	Indeks/ nilai yang diberikan berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi
3.	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas	%	$\frac{\text{Jumlah data statistik sektoral yang berkualitas sesuai standar}}{\text{Jumlah seluruh data statistik sektoral}} \times 100$
5.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan komunikasi publik	Persentase penduduk yang terpapar informasi publik	%	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang terpapar informasi publik}}{\text{Jumlah penduduk usia (usia 17 tahun ke atas)}} \times 100$
6.	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP dari Inspektorat

## N. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Terselenggaranya bangunan gedung pemerintahan yang optimal dan sesuai regulasi	Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik sesuai administrasi tata bangunan	%	$\frac{\text{Total bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik}}{\text{Total bangunan gedung pemerintahan}} \times 100$
2.	Meningkatnya akses air minum layak bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan	Persentase penduduk yang memiliki akses air minum layak bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan	%	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang terlayani}}{\text{Jumlah total penduduk di Kab. Pemalang}} \times 100$
3.	Meningkatnya akses sanitasi lingkungan layak bagi masyarakat	Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengelolaan limbah domestik	%	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik layak}}{\text{Jumlah total rumah tangga}} \times 100$
		Persentase sarana dan prasarana persampahan sesuai standar	%	$\frac{\text{Jumlah TPS/TPST/TPS3R sesuai standar yang terbangun}}{\text{Jumlah kebutuhan TPS/TPST/TPS3R di Kabupaten}} \times 100$
		Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	%	$\frac{\text{Panjang drainase dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah panjang drainase kabupaten (perkotaan)}} \times 100$
4.	Meningkatnya konektivitas antarwilayah	Indeks Konektivitas	%	$\frac{\text{Panjang jalan yang sudah terkoneksi}}{\text{Panjang jalan kabupaten}} \times 100$
5.	Meningkatnya kondisi jalan matap	Persentase panjang jalan kondisi mantap	%	$\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi baik + sedang}}{\text{Panjang jalan kabupaten}} \times 100$
6.	Meningkatnya pelayanan sistem irigasi	Indeks kinerja sistem irigasi	%	Indeks yang diperoleh dari penjumlahan: 1. Aspek kondisi prasarana fisik (45%) 2. Aspek produktivitas pertanian (15%) 3. Aspek sarana penunjang (10%) 4. Aspek organisasi personalia (15%) 5. Apek dokumentasi (5%) 6. Aspek kondisi P3A (10%)
7.	Meningkatnya pembangunan yang sesuai tata ruang	Persentase pemanfaatan tata ruang wilayah sesuai RTRW	%	$\frac{\text{Jumlah rencana pemanfaatan ruang yang dimohonkan}}{\text{Jumlah rencana pemanfaatan ruang yang dimohonkan sesuai dengan RTRW}} \times 100$
8.		Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP dari Inspektorat

## O. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Berkurangnya kawasan kumuh perkotaan	Persentase kawasan kumuh	%	$\frac{\text{Luas wilayah pemukiman kumuh yang belum tertangani}}{\text{Jumlah kawasan kumuh perkotaan}} \times 100$
2.	Meningkatnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Persentase RTLH yang tertangani	%	$\frac{\text{Jumlah rumah Tidak Layak Huni yang tertangani}}{\text{Jumlah Rumah Tidak layak Huni}} \times 100$
3.	Berkurangnya sengketa tanah garapan	Persentase sengketa tanah garapan tertangani	%	$\frac{\text{Jumlah segketa tanah garapan yang terselesaikan}}{\text{Jumlah sengketa tanah garapan}} \times 100$
4.	Meningkatnya sertifikasi kepemilikan hak atas tanah	Persentase sertifikasi kepemilikan hak atas tanah terfasilitasi	%	$\frac{\text{Jumlah sertifikat yang terselesaikan}}{\text{Jumlah pemohon sertifikat hak atas tanah}} \times 100$
5.	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP dari Inspektorat

## P. DINAS PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Rasio Konektivitas	Rasio	$\frac{\text{Jumlah trayek angkutan jalan (umum)}}{\text{Jumlah trayek angkutan jalan (umum) yang seharusnya tersedia}} \times \text{Rata rata bobot}$
2.	Meningkatnya pelayanan angkutan	Persentase pelayanan angkutan jalan	%	$\frac{\text{Persentase angkutan umum yang di revitalisasi optimalisasi layanan angkutan umum}}{\text{Angkutan yang ada}} \times 100$
3.	Meningkatnya sarana prasarana perhubungan	<i>Level of Service</i>	Rasio	$\frac{\text{Volume ruas/Kapasitas jalan rasio perkotaan Kabupaten Pemalang}}{\text{Jumlah jalan}}$
4.	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP dari Inspektorat

## Q. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Indeks kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	Indeks	$IKU = 100 - \left( \frac{50}{0,9} (I_{EU} - 0,1) \right)$
2.	Meningkatnya Indeks kualitas air	Indeks Kualitas Air	Indeks	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_R}{2}}$ <p>Dimana  L<sub>ij</sub> = Konsentrasi Baku Peruntukan Air  C<sub>i</sub> = Konsentrasi sampel parameter kualitas air  I<sub>pj</sub> = Pencemaran bagi peruntukan  IP<sub>J</sub> = (C<sub>i</sub>/L<sub>ij</sub>, C<sub>2</sub>/L<sub>2j</sub>,...)</p>

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
				(Ci/Lij)Maksimum = nilai maksimum dari Ci/Lij (Ci/Lij)Rata-rata = nilai rata-rata dari Cij/Lij
3.	Meningkatnya Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan Dan Kajian Teknis Lingkungan	%	$\frac{\text{jumlah dokumen lingkungan dan kajian teknis lingkungan yang disusun}}{\text{Jumlah dokumen lingkungan dan kajian teknis lingkungan yang harus disusun}} \times 100$
		Persentase kegiatan usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina	%	$\frac{\text{jumlah usaha atau kegiatan yang diawasi dan dibina}}{\text{Jumlah seluruh kasus yang ada pada tahun berjalan}} \times 100$
		Penyelesaian Kasus Lingkungan	%	$\frac{\text{jumlah kasus yang ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah seluruh kasus yang ada pada tahun berjalan}} \times 100$
4.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Persentase Masyarakat Yang Aktif Mengelola Lingkungan	%	$\frac{\text{jumlah lembaga masyarakat yang aktif d alam mengelola lingkungan}}{\text{Jumlah lembaga masyarakat yang ada}} \times 100$
5.	Peningkatan luasan tutupan vegetasi	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	%	$\frac{\text{Luas lahan yang ditanami}}{\text{Luas wilayah administrasi}} \times 100$
		Indeks Kualitas Lahan / Persentase Penanganan Lahan Kritis	Indeks	$IKL = 100 - \left( \left( 84,3 - \left( \left( \frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \right) \times \frac{50}{54,3} \right)$ <p>dimana LTL = Luas tutupan lahan LW = Luas wilayah Kabupaten DKK = dampak kanal dan kebakaran di kesatuan ekosistem gambut</p>
6.	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Persentase Penanganan sampah	%	$\frac{\text{Total Volume sampah yang dapat ditangani}}{\text{Total volume timbunan sampah Kabupaten Pemalang}} \times 100$
		Persentase pengurangan sampah	%	$\frac{\text{Total sampah yang dapat dikurangi}}{\text{Total timbunan sampah Kabupaten Pemalang}} \times 100$
7.	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP dari Inspektorat

## R. DINAS PERTANIAN

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya sumber daya ekonomi dan kemandirian pangan	Perentase infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	%	$\frac{\text{Infrastruktur lumbung pangan yang tersedia}}{\text{Jumlah desa yang ada}} \times 100$
2.	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor PPH	Angka	Susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada Tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan
3.	Meningkatnya keamanan pangan dan kerawanan pangan	% tertanganinya kejadian kerawanan pangan	%	$\frac{\text{Daerah rawan pangan yang tertangani}}{\text{Total daerah rawan pangan}} \times 100$
4.	Meningkatnya produktivitas sektor pertanian	Produktivitas pertanian (Padi)	Kw/Ha	$\frac{\text{Produksi padi}}{\text{Luas panen}}$
5.	Meningkatnya produksi subsektor perkebunan	Produksi kopi	Kg	Jumlah produksi kopi dalam 1 tahun
6.	Meningkatnya produksi subsektor peternakan	Produksi daging dan telur	Kg	Jumlah produksi daging sapi, daging ayam dan telur dalam 1 tahun
7.	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP dari Inspektorat

## S. DINAS PERIKANAN

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya produksi sektor perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	Kg	Jumlah produksi perikanan tangkap yang diperoleh
		Jumlah produksi perikanan budidaya	Kg	Jumlah produksi perikanan budidaya yang diperoleh
		Jumlah produksi hasil olahan perikanan	Kg	Jumlah produksi hasil olahan perikanan yang diperoleh
2.	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP dari Inspektorat

## T. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya budaya literasi di masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	Perhitungan aspek pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat per hari, jumlah perpustakaan ber-SNP, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan, anggota perpustakaan
2.	Meningkatkan birokrasi akuntabel	Indeks kearsipan	Indeks	Nilai indeks kearsipan eksternal (60%)+Nilai indeks kearsipan internal (40%)
3.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan	Persentase OPD yang mampu mengelola arsip dengan baik	%	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang telah dibina (dimonev)}}{\text{Jumlah seluruh perangkat daerah}} \times 100$
4.	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP dari Inspektorat

## U. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban wilayah	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	$\frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran Perda/Perbup}}{\text{Jenis pelanggaran yang diatur dalam Perda/Perbup}} \times 100$
2.	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban umum	Persentase kawasan patuh ketentraman dan ketertiban umum	%	$\frac{\text{Jumlah kecamatan yang pelanggaran Perda/Perbupnya menurun}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100$
3.	Meningkatnya kualitas penanganan kebakaran	Rasio kejadian kebakaran	%	$\frac{\text{Jumlah kejadian kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)}}{\text{Jumlah wilayah WMK}} \times 100$
4.	Meningkatnya Pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai response time	Cakupan pelayanan kebakaran	%	$\frac{\text{Jumlah luas WMK}}{\text{Luas wilayah kabupaten}} \times 100$
5.		Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP dari Inspektorat

## V. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang baik	%	$\frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan PD yang baik}}{\text{Jumlah dokumen perencanaan PD}} \times 100$ Keterangan: Dok perencanaan baik: Nilai SAKIP Komponen perencanaan > 21
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan kelitbangan	Persentase hasil kelitbangan yang diimplementasikan	%	$\frac{\text{Jumlah hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan oleh Pemerintah dan masyarakat}}{\text{Jumlah hasil Kelitbangan}} \times 100$
3.	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP dari Inspektorat

## W. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran	Nilai	$\frac{\text{Jumlah hasil pengukuran program dan pagu per program yang sesuai}}{\text{Jumlah keseluruhan program}}$
		Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran	Nilai	$\frac{\text{Jumlah hasil skor atas penyerapan anggaran}}{\text{Jumlah jenis belanja}}$

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
		Hasil Pengukuran Indeks Kondisi keuangan daerah	Nilai	$\frac{\text{Kemandirian keuangan} + \text{Fleksibilitas keuangan} + \text{Solvabilitas keuangan} + \text{Solvabilitas jangka pendek} + \text{Solvabilitas jangka panjang} + \text{Solvabilitas layanan}}{6}$
		Persentase Barang Milik Daerah yang dimiliki	%	$\frac{\text{Jumlah BMD yang telah memiliki bukti kepemilikan}}{\text{Jumlah BMD yang tercatat pada KIB}} \times 100$
2.	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP dari Inspektorat

## X. BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan tata kelola pendapatan daerah yang efektif, transparan dan akuntabel	Rasio peningkatan PAD	%	$\frac{\text{Realisasi PAD tahun } n - \text{Realisasi PAD thn } n - 1}{\text{PAD tahun } n - 1} \times 100$
2.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah	%	$\frac{\text{Jumlah Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan daerah}} \times 100$
3.	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP dari Inspektorat

## Y. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
2.	Meningkatnya Kompetensi ASN	Persentase Kompetensi ASN	%	$\frac{\text{Rata - rata Kompetensi ASN}}{\text{Jumlah seluruh ASN}} \times 100$
3.	Meningkatnya Kinerja ASN	Persentase Kinerja ASN	%	$\frac{\text{Jumlah seluruh nilai SKP ASN}}{\text{Jumlah seluruh ASN}} \times 100$
4.	Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan ASN	Persentase Tingkat Pendidikan ASN	%	$\frac{\text{Jumlah seluruh tingkat pendidikan ASN}}{\text{Jumlah seluruh ASN}} \times 100$
5.	Meningkatnya Disiplin ASN	Persentase Tingkat Kedisiplinan ASN	%	$\frac{\text{Jumlah ASN yang tidak melakukan pelanggaran disiplin}}{\text{Jumlah seluruh ASN}} \times 100$
6.	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP dari Inspektorat

## Z. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan kondusivitas wilayah	Persentase potensi konflik sosial yang tertangani	%	$\frac{\text{Jumlah potensi konflik sosia yang tertangani}}{\text{Total potensi konflik sosial yang terjadi}} \times 100$
2.	Meningkatkan solidaritas keagamaan	Persentase potensi konflik agama yang tertangani	%	$\frac{\text{Jumlah potensi konflik agama yang tertangani}}{\text{Total potensi konflik agama yang terjadi}} \times 100$
3.	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP dari Inspektorat

## AA. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas penanganan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	Jumlah total dari 7 indikator yaitu Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan (0,06), Pengkajian Resiko dan Perencanaan Terpadu (0,06), Pengmebangan

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
				Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik (0,075), Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana (0,105), Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana (0,21), Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana (0,35), dan Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana (0,14)
2.	Meningkatnya layanan informasi rawan bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	$\frac{\text{Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana}}{\text{Jumlah warga kabupaten}} \times 100$
3.	Meningkatnya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	$\frac{\text{Jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana}}{\text{Jumlah warga kabupaten}} \times 100$
		Cakupan desa/kelurahan tangguh bencana	%	$\frac{\text{Jumlah Desa / kelurahan yang terbentuk destana}}{\text{seluruh desa / kelurahan di Kabupaten Pemalang}} \times 100$
4.	Meningkatnya layanan evakuasi dan tanggap darurat	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	$\frac{\text{Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana}}{\text{Jumlah warga yang terdampak bencana}} \times 100$
5.	Meningkatnya layanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam	Persentase layanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam	%	$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana yang mendapat layanan rehabilitasi dan rekonstruksi}}{\text{Jumlah sarana dan prasarana terdampak bencana}} \times 100$
6.	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP dari Inspektorat

BB. KECAMATAN

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Cakupan layanan kecamatan	%	1. Persentase pelayanan publik yang tersedia + 2. Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif + 3. Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan + 4. Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani + 5. Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik <hr/> 5
2.	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP dari Inspektorat

BUPATI PEMALANG,

ttd  
cap

ANOM WIDIYANTORO